# UPAYA DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN KARAKTER MORAL UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI INDONESIA YANG BEBAS DARI KORUPSI

OLEH DR. IR. DJOKO UDJIANTO, MM. KETUA KOMISI X DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

#### PENYEBAB KORUPSI DAN PERAN PENDIDIKAN



Faktor-faktor yang penyebab korupsi adalah:

GREEDS (KESERAKAHAN)

OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)



**EXPOSURE** (PENGUNGKAPAN)

Ilustrasi GONE Theory terkait dengan penyebab korupsi.

#### Pendidikan selama ini dianggap:

- kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia secara utuh,
- lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat materialistis, ekonomis, dan teknokratis,
- mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan penalaran, tanpa diimbangi dengan kecerdasan hati dan emosi.

#### Output Pendidikan dianggap:

- telah melahirkan manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, tanpa memiliki kecerdasan hati, emosi, dan nurani.
- kasus-kasus yang merugikan negara, seperti korupsi misalnya, justru melibatkan orang-orang yang secara formal berpendidikan tinggi.



# Kita semua harus menjadi Subjek Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan PP No. 71 Th. 2000
menjelaskan tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang dilakukan oleh peran serta aktif perorangan,
Ormas, atau LSM, dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENDIDIKAN KARAKTER

Agama, Pancasila, UUD 1945, UU No. 20/2003

Teori Pendidikan, Psikologi, Nilai, Sosial Budaya

PENGALAMAN TERBAIK (BEST PRACTICES) DAN CONTOH PERILAKU ANTIKORUPSI NILAI-NILAI LUHUR

> NILAI-NILAI ANTI KORUPSI



Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya, Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Kebersamaan, Komitmen Pemangku Kepentingan

# Khusus bagi PERGURUAN TINGGI, Pendidikan Anti-Korupsi dijiwai oleh Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian Masyarakat Kampus - sebagai inkubator pembentuk dan pengawal 'Pemimpin yang Antikorupsi & Berintegritas'

Tantangan besar perguruan tinggi kita saat ini adalah **mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa** yang tidak hanya bertugas sebagai wahana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

# SISTEM PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

#### **FORMAL**

WAJIB DI SETIAP SATUAN PENDIDIKAN

#### TUJUAN PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

- Mencegah orang lain untuk tidak korupsi.
- 2. Mencegah diri sendiri untuk tidak korupsi.
- Mampu mengenali dan memahami korupsi.

### KEGIATAN EKSTRA

SEMINAR/ KULIAH UMUM

PELATIHAN, KURSUS

SOSIALISASI ANTI-KORUPSI

# DESAIN MATA PELAJARAN ANTI-KORUPSI

PENGAJAR:
Fasilitator,
motivator

MATERI: kognitif, terkini

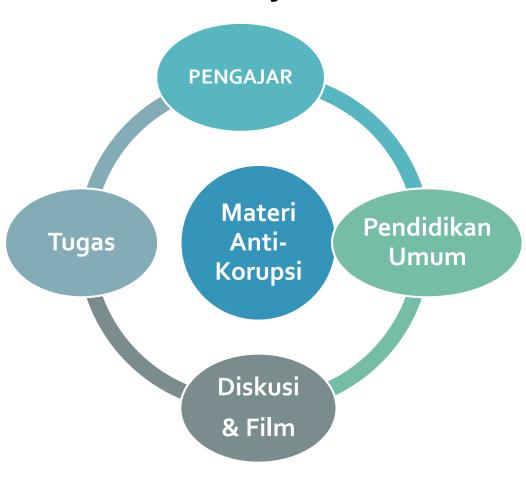
**ANTUSIASME** 

**PELAJAR** 

**TERHADAP** 

PERILAKU ANTI-KORUPSI

METODE: afektif, psikomotorik STRUKTUR PEMBELAJARAN



# **NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI**



## PERAN GENERASI ANTI-KORUPSI

- Pendidikan Anti Korupsi
- Pendidikan Karakter
- Kampanye Ujian Bersih

Pencegahan

# Opini

- Gagasan Ide
- Metode Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional ke Media

- Pressure Group
- Kampanye Anti-Korupsi

Gerakan Moral

#### **RINGKASAN**

Korupsi merupakan bentuk ketidakjujuran maupun penyimpangan yang merugikan, akibat dari kebutuhan dan keserakahan manusia serta didukung oleh kesempatan maupun perangkat, dan pelaksanaan hukum yang lemah.

Pendidikan anti-korupsi harus dimulai oleh adanya pengetahuan, aturan yang jelas, dan keteladanan semua pihak, yang berdasar pada karakter dan nilai-nilai anti-korupsi, diajarkan pada setiap satuan dan lingkup Pendidikan, sehingga menghasilkan individu berkarakter dan bersikap anti-korupsi.

Khusus Perguruan Tinggi, diharapkan menjadi inkubator pembentuk dan pengawal "Pemimpin yang Antikorupsi & Berintegritas" dapat mengoptimalisasikannya melalui penjiwaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Generasi anti-korupsi dan masyarakat luas, dapat berperan aktif dalam pengawasan yang bersifat: (1) pencegahan, (2) penyampaian opini, dan (3) gerakan-gerakan moral.

# TERIMAKASIH